

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

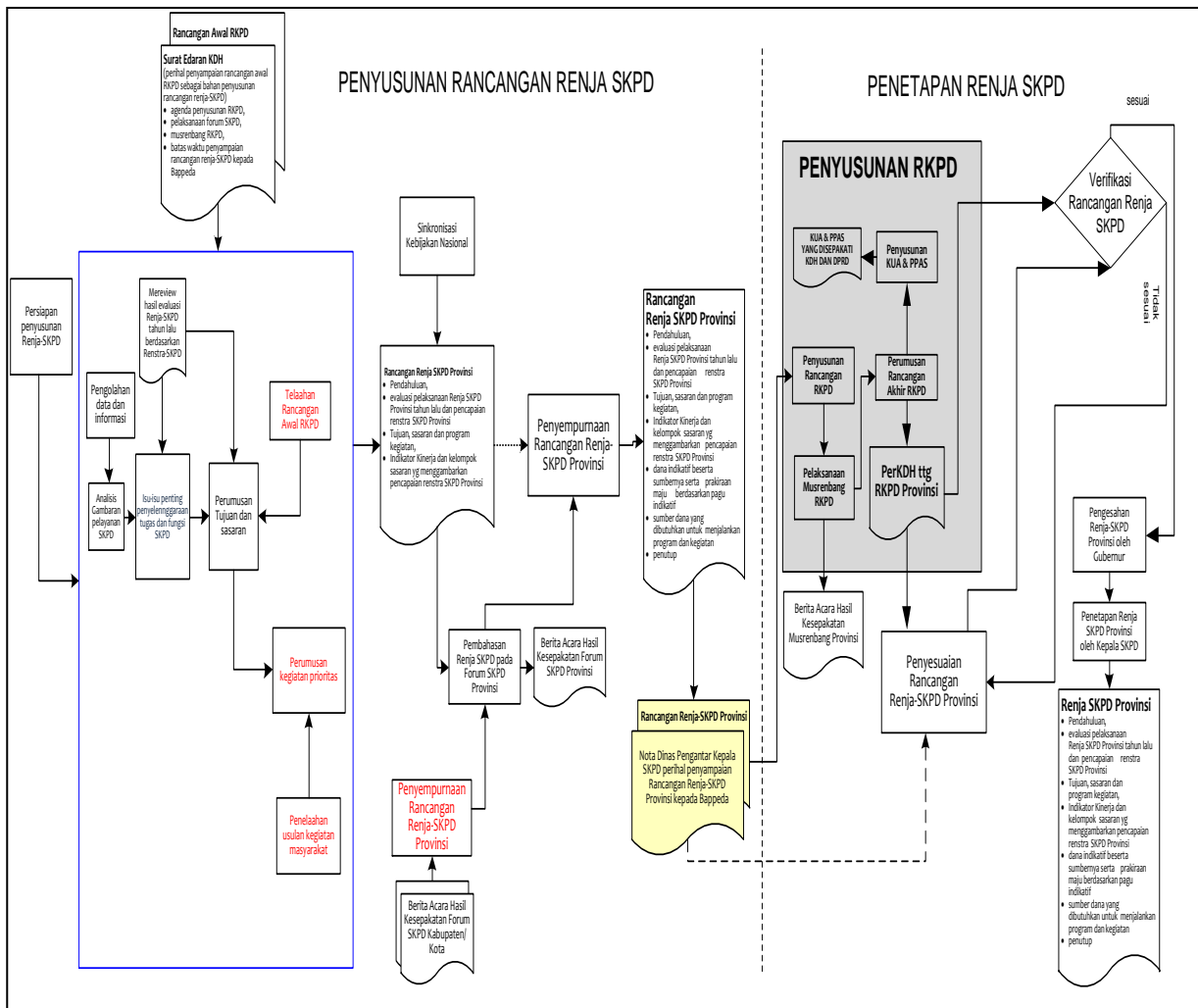
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetpan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah,



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 76)

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 9) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
2. Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU\
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
 - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

3. Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
 - a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - b. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
 - c. Program dan Kegiatan Tahun 2015
4. BAB IV PENUTUP
 - a. Kesimpulan
 - b. Rencana tindak lanjut

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 telah melaksanakan 4 (empat) program utama yang tercantum dalam penetapan Kinerja. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Bapedalda tahun 2013 (n-2) dapat disimak pada penjelasan di bawah ini :

- a. Dari 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapedalda semua capaian kinerjanya mencapai 100% dan realisasi anggaran berada diatas 85% kecuali untuk kegiatan Penyelesaian kasus-kasus di bidang lingkungan hidup. Rendahnya realisasi anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus di bidang lingkungan hidup dikarenakan oleh sebagian besar pengaduan kasus yang masuk merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (dari 9 kasus yang masuk hanya 1 yang merupakan kewenangan provinsi).

Hasil prakiraan evaluasi capaian pelaksanaan Renja SKPD Bapedalda tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel. 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPEDALDA dan PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s/d tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2016)		CAT	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	70	69,78	70				70	100	2014 angka sementara	
		Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah Buku analisis SLHD Sumbar Tahun 2014 Buku analisa SLHD tahun 2014 Draft buku data SLHD Prov. Sumbar tahun 2015	80 set buku SLHD 2015, 1 - draft buku data SLHD 2016	1	65 1 1	65 1 1	100	65 set buku SLHD 2016 Draft buku data SLHD Tahun 2017	80 set buku SLHD 2015, 1 draft buku data SLHD 2016	100	
		Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skala provinsi	7 kab/kota	8	10	11	110	11 kab/kota	7 kab/kota	100	
		Pembinaan Wasdal Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair ke Kegiatan/usaha	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	12 kegiatan	14	12	21	175	15 kegiatan	12 kegiatan	100	Pengantian nama kegiatan tahun 2016
		Penyelenggaraan Amdal di Prov. Sumbar	Jumlah dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL yang dinilai dan/atau diterbitkan rekomendasinya oleh kepala	-	12	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dipantau implementasi Amdal/UKL-UPL nya	-	4	6	6	100	-	-	-	
			Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	8 Kab/Kota	8	6	15	250	10 kabupaten/kota	8 Kab/Kota	100	

				Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah calon Sekolah Adiwiyata yang dibina dan dinilai tahun 2015	50 sekolah	62	60	177	295	60 sekolah	50 sekolah	100	
				Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang dipantau	6 sungai	3	4	4	100	6 sungai	6 sungai	100	
				Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 Kab/Kota	6	6	6	100	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100	Pengantian nama kegiatan tahun 2016
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data GRK bidang pengelolaan limbah	19 Kab/Kota	11	19	19	100	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100	
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	19 Kab/Kota	-	19	19	100	17 kab/kota	19 Kab/Kota	100	
				Program Pnaatan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati perizinan lingkungan	55%	50%	50%	35,20%	70,40%	%	55%	100,0%	
				Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan	Jumlah instansi LH Kab/Kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan penegakan hukum lingkungan serta perizinan	5 Kab/Kota	5	4	7	175	5 kabupaten/kota	5 Kab/Kota	100	Pengantian nama kegiatan tahun 2016
					Jumlah pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan	5 usaha dan/atau kegiatan	6	5	7	140	5 pemilik kegiatan	5 usaha dan/atau kegiatan	100	
					Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang menjadi target fasilitasi penegakan hukum lingkungan	2 objek	2	2	2	100	-	2 objek	100	
					Bimtekmediator	-	-	50	50	100	-	-	-	
				Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya	4 kasus	12	8	11	137,5	5 kasus	4 kasus	100	Pengantian nama kegiatan tahun 2016
				Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan (RPJMD dan/atau RTRW dan/atau RDTR) dan paket kajian KLHS untuk	5 Kab/ Kota	8	4	7	175	6 Kab/Kota 57 orang	5 Kab/ Kota	100	kajian KLHS untuk dokumen RPJMD Provinsi tidak dilaksanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup yang mesti dipenuhi oleh Bapedalda Prov. Sumbar sesuai dengan Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah 3 SPM yaitu :

- a. Informasi Status Mutu Air,
- b. Informasi Status Mutu Udara Ambien dan
- c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan target kinerja Bapedadla Prov. Sumbar yang telah ditetapkan melalui revisi Renstra Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2010-2015, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis dan beserta indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bapedalda. Kinerja pencapaian target-target tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar

NO	INDIKATOR	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
		(thn n-2)	thn (n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	thn (n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks pencemaran air sungai (IPA)	58 < IPA < 66	58 < IPA < 66	58 < IPA < 66	58 < IPA < 66	47,97	61,40	58	60	Batang Agam dan Batang Anai, Batang Pangean, Batang Ombilin fokus utama
2	Indeks standar pencemaran udara (IPU)	82 < IPU < 90	82 < IPU < 90	82 < IPU < 90	82 < IPU < 90	97,96	98,05	88	90	Kategori Sangat Baik
3	Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan (% kab/kota yang mengimplementasikan SOP)	40%	60%	70%	80%	83,33	100%	85%	85%	4 Kab/kota
4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	50%	50%	55%	70%	35,20%	49,12%	45%	47%	
5	Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25%	40%	40%	70%	25%	47,05%	45%	47%	
6	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	75%	80%	85%	80%	95,58%	97,25%	85%	88%	
7	Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan Lingkungan Hidup									

	-	Persentase Jumlah Kab/Kota yang ikut program Adipura	4	7,1%	73,7%	78,95%	4	0%	73,7		
	-	persentase peningkatan jumlah usulan calon penerima penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	6	20%	15%		10	20%	15%		
	-	Rasio keikutsertaan Sekolah dalam program adiwiyata)	10%	10%	3,42%	4,42%	14,28%	10,63%	3,42%		
	-	Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	12,5 %	20%	20%		11,11%	30%	20%		
	-	Persentase peningkatan Nagari/Kelurahan yang ikut program Nagari/Kelurahan Bersih	19 kec/kel	22 kec/kel	5%		22 kec/kel	23 kec/kel	5%		
	-	persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata pada tahun 2015	42	11,90%	15%		42	12%	15%		
8		Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi									
	-	Pelayanan informasi status mutu air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	-	Pelayanan informasi status mutu udara ambien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	-	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9		Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota									
	-	Pelayanan pencegahan pencemaran air	70%	75%	-	-	90,44%	95%	-	-	
	-	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	70%	75%	-	-	98,75%	100%	-	-	
	-	Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah	60%	65%	-	-	78,68%	85,83%	-	-	
	-	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	60%	65%	-	-	97,77%	100%	-	-	
10		Persentase Kab/Kota yang capaian pelaksanaan SPM nya > 80%	-	-	20%	25%	-	-	20%	25%	

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan beberapa target indikator kinerja yang belum dicapai Bapedalda Prov. Sumbar antara lain :

1. Kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Belum tercapainya target pada indikator ini salah satunya penyebabnya adalah rendahnya tingkat ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha, dimana faktor ini juga disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya :

- 1) Belum semua pemilik kegiatan dan/atau usaha yang memiliki struktur organisasi yang menangani masalah lingkungan hidup.
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- 3) Masih terdapatnya objek yang belum memberikan progres dalam pengelolaan lingkungan dan memiliki kendala yang sama tiap tahun penilaian. Kendala dapat bersumber dari objek sendiri seperti pemenuhan parameter baku mutu, bangunan penyimpanan LB3 sedangkan kendala dari Kabupaten/Kota seperti lamanya proses izin pembuangan limbah cair, izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan izin yang diproses oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu izin operasional insinerator.
- 4) Belum optimalnya upaya penegakan hukum lingkungan terhadap ketidaktaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha.

2. Adipura

Keikutsertaan kab/kota dalam pelaksanaan Program Adipura tahun 2015 belum mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan peserta Program Adipura, yaitu:

- ✓ Kepedulian Kepala Daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata kelola lingkungan yang baik mulai berkurang sehingga kepala daerah kurang antusias mengikuti Program Adipura.
- ✓ Ketersediaan anggaran yang tidak memadai sehingga pembinaan terhadap calon peserta Program Adipura tidak dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Sistem penilaian yang seringkali berubah tanpa pemberitahuan sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan SKPD dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Prov. Sumbar maka dirumuskan isu Strategis Lingkup Pelayanan Prov. Sumbar beserta faktor pendorong terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan lingkungan hidup sebagai tercantum pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Isu Strategis Lingkup Pelayanan Bapedalda

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
1	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> - Bapedalda - Dinas Kehutanan - Dinas Kelautan - Dinas Pariwisata - Dinas Tarkim - DLL 	Penurunan Kualitas Air Sungai Segmen Perkotaan	Aktifitas domestik dan pasar tanpa IPAL	Pengelolaan terpadu limbah perkotaan belum menjadi program strategis kab/kota	Meningkatkan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi dalam pengendalian pencemaran sungai
				Aktifitas kegiatan skala kecil/mikro tanpa IPAL (Industri, Hotel dan restaurant, RPH, Bengkel dll)	Pengembangan teknologi sederhana IPAL dan proses produksi bagi kegiatan skala kecil/mikro belum jadi prioritas instansi sektoral	
				Aktivitas pembuangan sampah ke sungai	Pelayanan limbah padat domestik masih terbatas	Harus ada program kerjasama antar sektor dan antar daerah
					Pembangunan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang (terutama daerah sempadan sungai)	
			Fluktuasi debit yang signifikan	Kerusakan pada DAS	Masalah perizinan (Illegal logging, PETI, alih fungsi lahan.	<i>Penggunaan lahan agar disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan mempertimbangkan Kondisi kualitas sumber Daya Air.</i>
				Kerusakan Sempadan	Alih fungsi hutan ke fungsi pemanfaatan lain (kebun, pertambangan dll)	<i>Memperbaiki dan mengendalikan fungsi sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung.</i> <i>Evaluasi perizinan dan disesuaikan dengan RTRW</i> <i>Tindakan penegakan hukum/sangsi bagi para pelaku illegal</i>

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
						<i>Koordinasi untuk pengawasan yang intensif bagi stakeholder terkait (Prov.Kab/Kota)</i>
2	Kualitas Udara Ambien	Kab/Kota	Menurunnya kualitas udara yang disebabkan meningkatnya volume kendaraan, industri dan kabut asap	Meningkatnya jumlah kendaraan, industri dan pembakaran lahan	Emisi gas buang kendaraan bermotor	Melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala dan memfollow up hasil pemantauan ke masing - masing Kab/Kota
					Emisi gas buang industri	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
					Pembukaan lahan baru	Pembinaan petani dalam buka lahan tanpa bakar
					Peningkatan jumlah penduduk	
					Peningkatan pendapatan penduduk	
					Meningkatnya jumlah investasi	
				Kiriman kabut asap dari Provinsi tetangga	Kebakaran hutan dan lahan	<i>Stressing Gubernur di Rakorgub untuk mengurangi jumlah titik api</i>
						Alat pemantau kualitas udara yang otomotasi + kerjasama dengan stasiun koto tabang + peningkatan SDM terkait pemantauan kualitas udara
						Koordinasi dengan PPE untuk alat PKU portable
3	Pemantauan BPO	Kab/Kota	Masih terdapatnya pemakaian refrigerant dan Bahan Perusak Ozon (BPO) lainnya	Meningkatnya jumlah bengkel dan industri yang masih menggunakan refrigerant tidak ramah lingkungan/oplosan	Harga freon oplosan/tidak ramah lingkungan lebih murah dibandingkan harga freon ramah lingkungan	Melakukan pengawasan penggunaan BPO pada bengkel - bengkel servis peralatan pendingin

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
			yang tidak ramah lingkungan pada berbagai sektor di masyarakat yang dapat memicu pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon			Meminta kepada instansi terkait (Disperindag) untuk menghentikan penjualan/peredaran BPO yang tidak ramah lingkungan
					Pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha bengkel terhadap BPO masih rendah	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
						Sosialisasi kepada pemilik usaha/kegiatan dan masyarakat
4	Kualitas Air Danau	Kab/Kota	Menurunnya kualitas air danau	Meningkatnya jumlah aktifitas di kawasan danau		Melakukan pemantauan kualitas air danau secara berkala
				Kerusakan hutan pada daerah resapan (catchment area) yang mengancam keberlangsungan ketersediaan air danau		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
				Pengelolaan sampah di sekitar danau yang belum optimal		Sosialisasi kepada pemilik usaha/kegiatan dan masyarakat terkait pengelolaan kawasan danau
			Kematian ikan massal	Banyaknya keramba yang melebihi daya dukung danau	Perda Zonasi Danau belum ditetapkan	Mempercepat legislasi dari Perda RTR 4 Danau di Sumbar
5	Kualitas Air Laut	Kab/Kota	Menurunnya kualitas air laut, muara sungai	Meningkatnya jumlah aktifitas di kawasan muara sungai, aktifitas pariwisata, limbah industri, dll	Kawasan permukiman di sempadan sungai dan pantai	Koordinasi dengan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Satpol PP, Dinas Kebersihan, dll
						Melakukan pemantauan kualitas air laut secara berkala
			Abrasi pantai	Kurangnya pengelolaan sampah di kawasan pesisir/laut		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
				Minimnya tegakan di pinggir pantai (<i>mangrove</i>)		Sosialisasi kepada pemilik usaha/kegiatan dan masyarakat terkait pengelolaan kawasan pesisir laut/pantai
				Masih belum semua pantai yang dilengkapi sipil teknis pengamanan abrasi (Grip)		Koordinasi dengan Prasjal Tarkim
6	Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam (Program Menuju Indonesia Hijau (MIH))	Kab/Kota, Dishut, BKSDA, BPDAS, dll	Menurunnya jumlah tutupan vegetasi	Pembukaan lahan	Ladang berpindah	Peningkatan pengawasan oleh instansi terkait (Polhut)
				<i>Illegal logging</i>	Izin pinjam pakai kawasan hutan	Koordinasi dengan Dinas Kehutanan
				Pemanfaatan hutan oleh kegiatan non kehutanan	Alih fungsi lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan tutupan vegetasi di daerah
7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca	Kab/Kota	Meningkatnya aktivitas pembakaran sampah, pembuangan sampah di sembarang tempat dan meningkatnya jumlah aktivitas yang membuang limbahnya ke sungai	Pelayanan pengangkutan sampah terangkutmasih rendah di setiap Kabupaten/Kota ke TPA. Hal ini mengakibatkan masih maraknya aktifitas pembakaran sampah	Belum semua kab/kota yang punya TPA <i>Sanitary Landfill</i>	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kebersihan kab/kota, Dinas Pertamanan, BLHD kab/kota, dll)lainnya dan masyarakat
				Belum tersosialisasinya program pemilahan dan minimasi sampah seperti pengomposan dan daur ulang		Sosialisasi kepada masyarakat 3R, Bank sampah
8	Keanekaragaman Hayati	Kabupaten/Kota, BKSDA, Masyarakat, Korporasi, LSM Lingkungan	Masih banyak spesies yang terancam punah	Alih fungsi kawasan hutan	Pembukaan lahan perkebunan	Penyelesaian Tata batas kawasan hutan
						peningkatan fungsi kawasan penyangga
					Aktifitas ladang berpindah	Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
				Perburuan liar	Nilai ekonomis dari satwa yang dilindungi tinggi	Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan penegak hukum
				Pembangunan Infrastruktur jalan yang melewati kawasan hutan		Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan
			Masih kurangnya basis data keanekaragaman hayati	Belum semua kab/kota menyusun buku status Kehati		Provinsi membina kabupaten/kota untuk menyusun basis data KEHATI
			Belum berkembangnya Taman Kehati	Kab/kota terkendala penyediaan lahan		Fasilitasi dan pembinaan provinsi kepada kabupaten/kota membangun Taman KEHATI sesuai dengan arahan RTRW kab/kota
9	Kawasan konservasi	BKSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bapeda, Dinas PU dan LSM Lingkungan	Tingginya tekanan terhadap kawasan konservasi	Kerusakan daerah penyangga kawasan konservasi	Kawasan penyangga beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan, pertanian, permukiman dan kawasan budidaya lainnya	Melakukan pembinaan kepada masyarakat desa sekitar kawasan konservasi (Pengembangan konsep desa konservasi) Koordinasi pengamanan daerah penyangga dengan stakeholders terkait
10	Sumber Daya Lahan	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian	Masih ada lahan bekas tambang yang belum direklamasi	Aktivitas pertambangan tanpa izin	Masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari lahan bekas tambang	Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pertambangan yang ramah lingkungan
				Pemilik konsesi yang tidak mematuhi AMDALnya	Biaya reklamasi yang cukup tinggi	Pembinaan kepada pemilik kegiatan dan penegakan hukum lingkungan
						Inisiasi penyusunan Perda RPPLH
			Masih tingginya luas	Banyak lahan yang ditelantarkan	Pemilik lahan pergi merantau	Penanaman lahan terlantar

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
			lahan kritis	pemiliknya		dengan tanaman produktif
				illegal logging	Belum optimalnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat	Pembinaan kepada aparaturnya dan masyarakat untuk ikut aktif menjaga kawasan hutan
				Kebakaran hutan dan lahan	Pembukaan lahan dengan dibakar oleh masyarakat/pengusaha	Peningkatan pengawasan dan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
			Banyak daerah yang rawan longsor	Kondisi tanah yang labil	Kurangnya vegetasi sebagai tutupan lahan	Menggalakkan gerakan menanam pohon seperti
11	Adipura	kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan	Belum semua kabupaten/kota mengimplementasikan konsep kota bersih dan teduh	Tingkat pelayanan sampah masih rendah	Rasio Sampah terangkut ke TPA masih rendah	Pembinaan kepada kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan melalui adipura, gerakan Sumbar bersih, dan sosialisasi sampai ke tingkat nagari
					Konsep 3R belum berjalan optimal	Sosialisasi penerapan konsep 3R
					Masih ada TPA open dumping	Koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di TPA dengan dinas terkait
					Jumlah Bank sampah masih sedikit dan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan	Pembinaan Peningkatan aplikasi bank sampah di kabupaten/kota
				Masih terdapat genangan di kawasan perkotaan	saluran drainase belum berfungsi secara optimal	Peningkatan fungsi saluran drainase
				Belum optimalnya pengelolaan RTH Publik	Kendala penyediaan lahan	Mendorong kabupaten/kota untuk menyediakan lahan RTH sesuai dengan kriteria Adipura dan arahan RTRW kab/kota bersangkutan

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
	Sistem Informasi Lingkungan	Instansi Teknis Provinsi, Kabupaten/kota	Sulitnya memperoleh data dari SKPD	Data tidak tersedia pada saat dibutuhkan		Membuat SOP SILH lingkup Prov Sumbar
						MoU dengan Biro Humas kab/kota terkait SILH
						Pengadaan jejaring informasi lingkungan hidup yang terhubung dengan 19 kab/kota
						Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung
			Terlambatnya data dari kabupaten/kota	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk sarana dan prasarana		
			Informasi lingkungan hidup belum tersebarluaskan secara optimal dan realtime	Tidak ada dukungan data dari bidang-bidang		
				Kurangnya SDM pengelola SIL		Penugasan 1 orang staf untuk mengelola website Bapedalda
			Belum tersedianya laboratorium untuk uji parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	Persyaratan akreditasi sesuai dengan kriteria SNI 17025 dan PermenLH 6/2009 belum bisa dipenuhi oleh laboratorium yang ada	Kelembagaan laborotorium belum terbentuk (minimal berbentuk UPT)	Pelatihan/Bimtek untuk SDM laboratorium lingkungan Prov dan kab/kota
						Surat Edaran Gubernur kepada kab/kota terkait kelembagaan Lab. Lingkungan
12	Penegakan Hukum Lingkungan	BLH Kab/Kota	Pengaduan dan Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat	Minimnya tingkat penataan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan serta Perizinan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Masih minimnya pemahaman dan komitmen pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-	Meningkatkan Kapasitas SDM dalam melakukan penanganan Penegakan Hukum

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
					undangan lingkungan hidup.	
		Instansi Teknis Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/kota		Belum optimalnya upaya penegakan hukum.	Pelanggaran yang ditemui dari fasilitasi penyelesaian pengaduan jarang yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan	Meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder Tk. Prov dan Kab/kota
					Political will dari pimpinan daerah untuk melakukan penegakan hukum lingkungan masih kurang dalam penanganan pengaduan/kasus lingkungan	Memberikan arahan dan Stressing Gubernur dalam Rakor Bup/Wako.
					Seringnya terjadi mutasi personal yang membidangi hukum lingkungan (PPLHD dan PPNS) di Kab/kota	
		Aparat Penegak Hukum (POLRI dan Kejaksaan)		Makin meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.		Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di kabupaten/kota
		Akademisi/PSLH				
		Lembaga Sosial Masyarakat				
		Media				

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
13	Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	BLH kab/kota	Masih terdapatnya pemilik usaha dan/atau kegiatan yang belum menindaklanjuti izin lingkungan dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Kurangnya Kepedulian pemilik usaha/kegiatan di dalam menindaklanjuti izin lingkungan dengan izin PPLH	Pemilik usaha dan/ atau kegiatan tidak taat	
					Pemilik usaha dan/ atau kegiatan belum memahami peraturan perundang-undangan	
					Terbatasnya kemampuan kab/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan (SDM dan Anggaran)	Provinsi membantu melaksanakan pembinaan secara terkoordinasi dengan kabupaten/kota lokasi usaha dan/atau kegiatan
				Masih banyak perizinan kegiatan/usaha yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kab/kota	Belum adanya kesamaan persepsi Kab/kota dalam penerbitan Izin Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyamaan persepsi kabupaten/kota terkait penerbitan izin PPLH melalui Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan instansi LH se-Provinsi Sumbar
		Instansi Teknis Terkait Tingkat Provinsi dan Kab/kota	Masih terdapatnya izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang belum mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.	SDM Kab/Kota belum memiliki persepsi yang sama dalam penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.	Beragamnya pemahaman kab/kota terhadap aturan perizinan PPLH	Adanya pedoman umum dari Provinsi Sebagai acuan dalam mengeluarkan JUKLAK dan JUKNIS oleh Kab/kota

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
14	Penyelenggaraan Amdal/UKL-UPL	Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota	Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Komisi Penilai Amdal berlisensi.	Tidak semua kab/kota yang memenuhi persyaratan untuk memiliki komisi penilai AMDAL berlisensi	Political will dari pemkab/pemko untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi lingkungan hidup (setingkat eselon II) dan peningkatan kapasitas SDM lingkungan untuk pemenuhan persyaratan lisensi komisi AMDAL masih kurang.	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara kontinu terutama terhadap kab/kota yang padat investasi dan kegiatan pembangunan yang belum memiliki Komisi Penilai Amdal berlisensi.
					Kurangnya pemahaman aparat Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap persyaratan lisensi Komisi Penilai Amdal sesuai ketentuan yang berlaku.	Adanya dukungan dan himbauan provinsi kepada pemerintah kab/kota untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan SDM
		Instansi/SKPD terkait provinsi		Keterbatasan SDM.	Adanya pandangan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa permasalahan lingkungan di daerah yang bersangkutan belum begitu kompleks, sehingga urusan lingkungan hidup belum merupakan suatu hal yang prioritas, dan peningkatan status/kapasitas kelembagaan belum merupakan suatu hal yang penting.	Meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam upaya peningkatan status/kapasitas kelembagaan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
		Perguruan tinggi	Belum optimalnya penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL di kabupaten/kota	Masih kurangnya pemahaman terhadap SOP/NSPK terkait penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL. Ada komisi AMDAL kab/kota yang belum punya SOP/NSPK	Pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya mempedomani SOP/NSPK terkait penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penatalaksanaan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan di kabupaten/kota.

No	Lingkup pelayanan	Stakeholder	Isu strategis/permasalahan	Faktor Pendorong Terjadinya permasalahan	Faktor Pendorong dari Faktor Pendorong	Arahan tindak lanjut/ Arahan kegiatan Bapedalda
		Institusi/organisasi kemasyarakatan	Belum semua pemilik/ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengimplementasikan dokumen lingkungan yang dimiliki.	Masih kurangnya komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengimplementasikan dokumen lingkungannya.	Masih minimnya pemahaman penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatannya sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen lingkungan yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
		Masyarakat terkena dampak				
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan				
15	Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Instansi/SKPD terkait provinsi	Belum semua dokumen perencanaan (KRP) yang dilengkapi dokumen KLHS.	Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten/kota dan <i>stakeholder</i> terhadap aturan/keputusan terkait pelaksanaan KLHS.	Masih kurangnya sosialisasi/pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan <i>stakeholder</i> terhadap aturan/keputusan terkait pelaksanaan KLHS	Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pelaksanaan KLHS.
		Instansi/SKPD terkait kabupaten/kota		Anggaran penyusunan dan pelaksanaan KLHS yang tidak disediakan kab/kota	Kurangnya komitmen kab/kota untuk melaksanakan KLHS	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan KLHS.
		Perguruan tinggi/akademisi				
		Institusi/organisasi kemasyarakatan				
		Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan				
		Perwakilan masyarakat				
						Stressing Gubernur ke Kab/kota melalui Rakor kab/kota se-Sumbar

Bab III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) nasional pada tahun 2013 adalah 63,13 dan ditargetkan meningkat menjadi 68,5 pada tahun 2019 (RPJMN Tahun 2015-2019).

Beberapa kebijakan nasional yang harus didukung oleh Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah:

1. Adipura
2. Adiwiyata
3. Proper
4. Kalpataru
5. MIH

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan isu strategis lingkup pelayanan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat;
2. Meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

Sasaran:

1. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;
2. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
4. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup

Hubungan antara Tujuan dan sasaran Renja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat;	Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;	- Indeks pencemaran air sungai (IPA) - Indeks standar pencemaran udara (IPU)

	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jumlah Kab/Kota yang ikut program Adipura (%) - persentase peningkatan jumlah usulan calon penerima penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi (%) - Rasio keikutsertaan Sekolah dalam program adiwiyata (%) - Usaha/kegiatan peringkat biru proper yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH (%) - Persentase peningkatan Nagari/Kelurahan yang ikut program Nagari/Kelurahan Bersih (%) - persentase bank sampah yang aktif dari seluruh bank sampah yang terdata pada tahun 2015 (%)
	Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup	<p>Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan informasi status mutu air - Pelayanan informasi status mutu udara ambien - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat <p>Persentase Kab/Kota yang capaian pelaksanaan SPM nya > 80%</p>
2	Meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<p>Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang</p>

	<p>mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan</p>
<p>Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.</p>	

3.3. Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WAJIB								
	Lingkungan Hidup				7.500.000.000				10.048.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	1.418.857.824			100%	1.597.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM	Padang	12 bulan	45.000.000	APBD		12 bulan	61.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet, sewa hosting website	Padang	12 bulan	251.087.464	APBD		12 bulan	293.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	Padang	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	150.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang	12 bulan	37.000.000	APBD		12 bulan	45.000.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Padang	12 bulan	38.000.000	APBD		12 bulan	45.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik/penerangan	Padang	12 bulan	5.500.000	APBD		12 bulan	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	6 jenis	120.000.000	APBD		3 jenis	112.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/surat kabar harian yang disediakan	Padang	7 judul	25.000.000	APBD		7 judul	33.000.000
	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan dan minum kantor	Padang	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	35.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah, pelaksanaan Bintek dan sosialisasi dalam dan luar propinsi	terlaksananya konsultasi dan koordinasi kedalam dan luar provinsi	Sumatera Barat	12 bulan	350.000.000	APBD		12 bulan	415.000.000
	Penyediaan Tenaga Sopir	Pembayaran honorarium Jasa tenaga Sopir	Padang	11 bulan	185.894.610	APBD		12 bulan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Pembayaran honorarium Jasa Pengaman Kantor	Padang	11 bulan	186.375.750	APBD		12 bulan	198.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	735.832.000			100%	630.000.000
	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor bapedalda	Padang	-	0	APBD		1 paket	50.000.000
	Pengadaan meubeleu	Jumlah unit meubeleu yang di adakan	Padang	6 jenis	59.000.000	APBD		4 jenis	88.000.000

		Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC dan laptop/note book, printer, scanner	Padang	3 jenis	112.000.000	APBD		3 jenis	76.000.000
		Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio dan Komunikasi dan informasi	Padang	8 unit	73.500.000	APBD		8 unit	90.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan kantor, pemeliharaan pekarangan	Padang	7 paket	95.000.000	APBD		7 paket	75.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tersedianya suku cadang dan pajak/STNK serta asuransi kendaraan	Padang	6 unit roda empat	115.928.560	APBD		6 unit roda empat	98.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air	Padang	12 bulan	30.800.000	APBD		12 bulan	27.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	5 jenis	34.500.000	APBD		5 unit	28.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC	Padang	25 unit	23.750.000	APBD		27 unit	28.000.000
		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Padang	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	55.000.000
		Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	Padang	10 m lari	19.818.100	APBD		10 m lari	15.000.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	37.800.000			100%	38.000.000
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	Padang	70 stel	37.800.000	APBD		72 Pegawai	38.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparaturnya untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	150.000.000			100%	180.000.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	12 kali	150.000.000	APBD		12 kali	180.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	186.733.576			100%	188.000.000
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda	Padang	9 dokumen	18.000.000	APBD		9 dokumen	18.000.000
		Penata usahaanaan keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	Padang	12 bulan	155.733.576	APBD		12 bulan	157.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda	Padang	7 dokumen	13.000.000	APBD		7 dokumen	13.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH		70,99	3.274.000.000			71,13	4.990.000.000

			Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah objek/kegiatan yang dilakukan wasdal terhadap kerusakan lingkungan (lahan pertambangan dan lahan akses terbuka)	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. 50 Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Dharmaraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kota Padang	12 objek / kegiatan	125.000.000	APBD		12 objek / kegiatan	300.000.000
			Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutunya	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi	1 sungai (Batang Masang Gadang) dan 1 pergub	110.000.000	APBD		1 sungai	120.000.000
				Pergub status mutu air sungai lintas kab/kota						-	
			Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang dipantau	Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Padang Pariaman	10 sungai	450.000.000	APBD		12 sungai	650.000.000
			Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Terbentuknya rencana teknis pemulihan sungai Batang Agam (klaster pengelolaan limbah cair)	Kab. Agam, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota	1 klaster pengelolaan limbah cair domestik	240.000.000	APBD		1 klaster pengelolaan limbah cair domestik	400.000.000
			Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	15 Kab/Kota (kecuali, kota padang, kab. Mentawai, kab. Tanah datar, kota pariamn)	12 kegiatan / usaha	100.000.000	APBD		18 kegiatan	250.000.000

			Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Sijunjung, dan Kab. Solok	16 objek/kegiatan	110.000.000	APBD		18 objek	160.000.000
			Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	150.000.000	APBD		19 Kab/Kota	250.000.000
			Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya	Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Payakumbuh Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar	10 kabupaten/kota	110.000.000	APBD		11 kab/kota	180.000.000
				Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya	Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmaraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Kota Bukittinggi	5 kabupaten/kota				6 kab/kota	
			Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	Kota/Ibukota Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat	15 Kab/Kota	150.000.000	APBD	Penghargaan adipura diselenggarakan Pemerintah Pusat setiap tahun	15 Kab/Kota	250.000.000
			Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.	Jumlah Kab/Kota yang teridentifikasi pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel service peralatan pendingin	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	125.000.000	APBD		17Kab/Kota	150.000.000
				Sosialisasi untuk bengkel-bengkel service peralatan pendingin tentang bahaya penggunaan BPO						-	

			Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R dan jumlah bank sampah yang dibangun	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota bank sampah	215.000.000	APBD Provinsi	Nawacita 1000 bank sampah	18 Kab/Kota	70.000.000
			Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Terlaksananya penilaian kecamatan/kelurahan bersih Tk. Provisi	19 Kab/kota	12 Kecamatan 14 kelurahan	220.000.000	APBD	Prioritas Pemerintah Provinsi Sumbar	12 Kecamatan 14 kelurahan	625.000.000
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Berwawasan Lingkungan)	Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program adiwiyata	19 Kab/Kota	115 sekolah	530.000.000	APBD	Program Nasional	115 sekolah	530.000.000
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	19 Kab/kota	19 kab/kota	85.000.000	APBD Provinsi	PPSP merupakan program nasional yang harus didukung provinsi	19 kab/kota	90.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Instansi LH Kab/Kota	Jumlah laboratorium lingkungan DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada instansi LH kab/kota	19 Kab/Kota	11 laboratorium	100.000.000	APBD		12 laboratorium	280.000.000
			Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kota Pariaman	5 Kab/Kota	110.000.000	APBD		5 Kab/Kota	170.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	Sumatera Barat	70 orang peserta	100.000.000	APBD Provinsi		19 Kab/Kota	150.000.000
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi		19 Kab/Kota							
			Program Kampung Iklim	Jumlah Nagari/Jorong/Korong (calon kampung iklim) yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim	19 Kab/Kota	18 Nagari / jorong / korong	110.000.000			19 Kab/Kota	175.000.000
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data penurunan emisi GRK bidang pengelolaan limbah	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	134.000.000	APBD		19 Kab/Kota	190.000.000
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH		70,99	604.528.000			71,13	790.000.000

		Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder, masyarakat dan dunia usaha-nya dalam pelestarian ekosistem danau	Kab. Agam, Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar	4 danau (Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah)	190.000.000	APBD		4 danau	200.000.000
		Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan	6 Kab/Kota	125.000.000	APBD		6 Kab/Kota	160.000.000
		Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan	Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi	Nagari/kelurahan di kabupaten/kota di Sumbar	3 nagari/kelurahan	83.180.000	APBD		3 nagari/kelurahan	130.000.000
		Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup)	Jumlah perusahaan yang dibina dalam pelaksanaan program CSR bidang lingkungan hidup	19 Kab/Kota	8 perusahaan	110.000.000	APBD		8 perusahaan	150.000.000
		Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah kabupaten/kota dengan taman kehati yang dibina	Taman kehati dan daerah penyangga kawasan konservasi di Provinsi Sumbar	4 Kab/Kota	96.348.000	APBD		5 Kab/Kota	150.000.000
			jumlah kabupaten/kota dengan daerah penyangga konservasi yang dibina		3 Kab/Kota				3 Kab/Kota	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		40%	537.248.800			60%	860.000.000
		Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah usulan calon penerima Kalpataru Tk Nasional dari Provinsi Sumbar yang dibina	19 Kab/Kota	8 orang/kelompok	82.248.800	APBD	Penghargaan Kalpataru diselenggarakan Pemerintah Pusat setiap tahun	8 orang/kelompok	120.000.000
		Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat	Jumlah buku SLHD Prov. Sumbar Tahun 2016 yang dicetak	Sumatera Barat	40 buku	275.000.000	APBD		40 buku	370.000.000
			Draft buku data SLHD Prov. Sumbar Tahun 2017		Draft buku data SLHD Tahun 2017				Draft buku data SLHD Tahun 2018	
			Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai penyusun buku SLHD terbaik tingkat Provinsi		5 Kab/Kota				5 Kab/Kota	
		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	Sumatera Barat	1 even	100.000.000	APBD		1 even	250.000.000
		Pegembangan Sistim Informasi Lingkungan	Jumlah paket pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	19 Kab/Kota	1 paket	80.000.000	APBD	Implementasi UU No,14 Tahun 2008 ttg Pelayanan Pelayanan Publik	1 paket	120.000.000

			Program Pnaatan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan		60%	554.999.800			70%	775.000.000
			Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	Jumlah Kab./Kota yang dievaluasi dalam pembinaan hukum dan perizinan serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan	19 Kab/Kota	10 kabupaten/kota	159.999.800	APBD		10 kabupaten/kota	250.000.000
				Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan.		5 objek		APBD		5 objek	
			Penaatan Hukum Lingkungan	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	19 Kab/Kota	7 kasus	170.000.000	APBD		7 kasus	250.000.000
				Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dan implementasi penreapan sanksi		10 objek				10 objek	
			Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah	Penyusunan 1 (satu) paket dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan Prov. Sumbar		1 paket	225.000.000	APBD		1 Ranperda	275.000.000

Bab IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan penjabaran pra Rencana Strategis Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

RENJA-SKPD Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang dan sekretariat pada SKPD Bapedalda Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2017 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani arahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-SKPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bapedalda berkewajiban menjamin konsistensi antara rancangan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 dengan pra Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 Bapedalda Provinsi Sumatera Barat .

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-SKPD Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.